

FAKTOR EKSTERNAL DAN INTERNAL YANG MEMENGARUHI MOTIVASI DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Komang Mega Budiarti¹
Putu D'yan Yaniartha Sukartha²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: megabudiarti@rocketmail.com/telp:+62 85 73 73 47 499

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Tinggi rendahnya kepatuhan didasari oleh seberapa besar motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, yang bersumber dari faktor eksternal dan internal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel persepsi kasus korupsi, *gender*, dan norma moral pada motivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Lokasi penelitian ini di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan. Teknik sampelnya adalah *Convenience Sampling* dan menggunakan 99 responden wajib pajak orang pribadi nonkaryawan. Pengumpulan data dengan media kuesioner dan teknik analisis yang digunakan regresi linear berganda dengan variabel *dummy*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing variabel persepsi kasus korupsi berpengaruh negatif, *gender* berpengaruh, dan norma moral berpengaruh positif pada motivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Kata kunci: *persepsi kasus korupsi, gender, norma moral*

ABSTRACT

The level of compliance is based on how much motivation taxpayers in meeting tax obligations, sourced from external and internal factors. The purpose of this study was to determine the effect of each variable perceptions of corruption, gender, and moral norms on motivation in meeting tax obligations. The location of this study in the Tax Office Primary South Badung. Convenience sampling technique and the sample was 99 respondents using individual taxpayer non-employees. The collection of data by the media questionnaires and analysis techniques used multiple linear regression with dummy variables. The results showed that each of these variables negatively affect the perception of corruption cases, the gender effect, and moral norms have positive influence on the motivation in meeting tax obligations.

Keywords: *perceptions of corruption, gender, moral norms*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya sumber daya alam (SDA). Pengelolaan SDA yang tidak baik, tentunya tidak akan bisa menjadikan SDA sebagai sumber utama pembiayaan negara. Pembangunan infrastruktur menjadi faktor penunjang utama dalam memaksimalkan pengolahan SDA. Pembangunan

infrastruktur juga merupakan investasi yang sangat besar dan untuk membiayai investasi tersebut maka pemerintah mengandalkan penerimaan pajak, yang dapat dilihat di Tabel 1.

Tabel 1.
Peran Pajak terhadap APBN Tahun 2009-2013

Tahun Anggaran	Jumlah (dalam miliar)		Prosentase Pajak: APBN
	APBN (Rp)	Pajak (Rp)	
2013	1.502.005	1.148.365	76%
2012	1.338.110	980.518	73%
2011	1.210.600	873.874	72%
2010	995.272	723.307	73%
2009	848.609	619.922	73%

Sumber: Badan Pusat Statistik diolah, 2014

Tabel 1 menunjukkan bahwa penerimaan pajak dalam APBN terus meningkat tiap tahunnya serta memiliki proporsi paling banyak, yang menandakan pajak itu penting. Kekayaan alam yang semakin lama semakin menipis, juga mendorong pemerintah untuk terus memaksimalkan penerimaan pajak tersebut. Penerimaan pajak yang tinggi tentu disebabkan oleh tingginya kepatuhan wajib pajak, namun tinggi kepatuhan sangat dipengaruhi oleh seberapa besar motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Supriyati, 2012)

Menurut teori Atribusi, motivasi seseorang didasari oleh faktor eksternal dan internal (Lubis, 2011: 88). Teori ini menjelaskan apa yang mempengaruhi siapa untuk melakukan apa. Dilihat dari segi eksternal atau yang berasal dari luar wajib pajak, sudah banyak upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna meningkatkan motivasi wajib pajak dari perubahan sistem perpajakan (*self assessment system*) sampai pemodernan sistem administrasi perpajakan.

Disamping upaya DJP, terdapat fenomena kasus korupsi yang terus terungkap hingga kini dan meresahkan masyarakat. Munculnya kasus korupsi di kalangan pegawai pajak hingga pejabat pemerintah, tentu menimbulkan persepsi jelek dan mengubah pandangan wajib pajak akan manfaat sebenarnya terkait membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Irawan, dkk (2013) dan Auwaliah, dkk (2013) yang menyimpulkan adanya pengaruh negatif tentang persepsi wajib pajak atas kasus korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kedua, adalah faktor internal yang ada dalam diri wajib pajak. Sebanyak apapun upaya yang dilakukan, apabila yang bermasalah sebenarnya ada dalam diri wajib pajak maka upaya yang dilakukan DJP tidak akan pernah efektif. Carroll (1987) mengungkapkan motivasi dari faktor internal lebih memengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan pajak. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ghosh dan Crain (1996) serta James *et al.* (2001). Salah satunya adalah *gender*, yakni perbedaan sifat yang ada dalam diri laki-laki dan perempuan yang tampak pada tingkah laku wajib pajak. Wajib pajak dalam hal laki-laki, pembawaannya lebih suka risiko (Rubin dan Paul, 1979) dan lebih percaya diri untuk melakukan sesuatu atau menekankan ketakutannya terhadap sanksi yang ada. Berbeda dengan wajib pajak perempuan, pembawaannya lebih kepada hal-hal yang aman, lebih memiliki hati nurani atau perasaan bersalah jika tidak membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Fallon (1999) menyebutkan bahwa wanita cenderung memiliki rasa etis yang lebih besar dibandingkan responden pria. Penelitian Kasilillai dan H. A. Jabbar (2006) membuktikan terdapat kesamaan pada perilaku kepatuhan wajib pajak.

Norma moral juga perlu diperhatikan karena menentukan perbuatan yang lebih ditujukan pada diri sendiri dan bukan sebagai suatu perintah yang ditujukan untuk orang lain (Asshiddiqie dan Ali, 2006:27). Norma moral yang baik mencerminkan pemikiran yang positif dan akan menghindari semua hal yang dinilai jelek dan merugikan bagi diri sendiri dan pihak lain. Penelitian yang dilakukan Permadi, dkk (2013) menunjukkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh norma moral.

Korupsi dikatakan sebagai penyalahgunaan dana untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain (Irawan, dkk 2013). Kasus korupsi yang terungkap hingga kini, menimbulkan persepsi negatif di kalangan wajib pajak. Persepsi sendiri memiliki arti sebagai proses individu dalam menafsirkan dan memberikan interpretasi yang menggambarkan kesannya terhadap suatu kenyataan atau fenomena yang telah terjadi dalam lingkungan (Robbins dan Timothy, 2009:175).

Gender merupakan perbedaan sifat dan peran antara laki-laki dan perempuan. Murniati (2004:61) menjelaskan perbedaan sifat tersebut disebabkan oleh hasil dari sosialisasi (teori *nurture*), sedangkan perbedaan peran disebabkan oleh perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan (teori *nature*). Perbedaan sifat yang dimaksud, laki-laki tidak mengenal takut, suka risiko (Coet dan McDermott, 1979), kasar dalam berbuat dan agresif, sedangkan perempuan lebih sensitif, emosional, berpegang teguh pada moral, berperasaan (Priyatna, 2012).

Menurut Satyanugraha (2003) dalam Gustina (2008) mengartikan norma moral sebagai standar yang dimiliki oleh masing-masing individu tentang hal-hal apa yang benar dan yang salah maupun apa yang baik dan apa yang jahat. Keraf

(1998) dalam Gustina (2008) menjelaskan norma moral memiliki ciri-ciri lebih didahulukan sebelum kepentingan pribadi serta melibatkan perasaan apabila melakukan kesalahan atau melihat orang lain yang melakukan kesalahan.

Motivasi merupakan dorongan yang menyebabkan seseorang mengarahkan perilakunya untuk mencapai tujuan tertentu (Gibson, *et al.*, 1996:185). Teori Atribusi menjelaskan bahwa motivasi seseorang dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan ditentukan oleh faktor eksternal yang bersumber dari luar diri individu dan faktor internal yang bersumber dari dalam diri individu tersebut.

Persepsi negatif wajib pajak dapat berdampak pada menurunnya motivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Mengacu pada penelitian sebelumnya Irawan, dkk (2013) dan Auwaliah, dkk (2013) yang menunjukkan adanya pengaruh negatif penyelewengan pajak pada perilaku wajib pajak dalam membayar pajak. Makadari itu, dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₁: Persepsi kasus korupsi berpengaruh negatif pada motivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Adanya *gender*, yakni perbedaan sifat wajib pajak yang ada dalam diri laki-laki dan perempuan dapat memengaruhi motivasi dalam memenuhi kewajiban. Aryati (2012) menyimpulkan *gender* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Makadari itu, dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₂: *Gender* berpengaruh pada motivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh seberapa tinggi moral wajib pajak (Torgler, *et al.* 2008). Ho (2009) juga

menyatakan ketika wajib pajak memiliki tanggung jawab moral yang kuat maka akan berdampak pada tingginya pelaporan pajak. Rumusan hipotesis yang didapat adalah sebagai berikut.

H₃: Norma moral berpengaruh positif dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

METODE PENELITIAN

KPP Pratama Badung Selatan dipilih sebagai lokasi penelitian karena wilayah tersebut merupakan kawasan pariwisata yang sangat digemari dan banyak masyarakat yang bekerja sebagai nonkaryawan. Nonkaryawan yang dimaksud adalah tenaga ahli, penerjemah, seniman, agen iklan, olahragawan, pemberi jasa dalam segala bidang, petugas penjaja barang dagangan ataupun dinas luar asuransi, dan lain-lain. WPOP nonkaryawan lebih rentan terhadap pelanggaran pajak mengingat wajib pajak menghitung sendiri pajaknya, seperti halnya yang diungkapkan Hanno dan Violette (1996). Data primer yang digunakan berupa jawaban dari kuesioner dan data sekunder yakni jumlah WPOP nonkaryawan yang terdaftar dan masih efektif di KPP Pratama Badung Selatan. Populasi WPOP nonkaryawan berjumlah 12.460 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *convenience sampling* dan didapat sebanyak 99 wajib pajak sebagai reponden.

Analisis regresi linear berganda dengan variabel *dummy* merupakan teknik yang dipakai dalam penelitian ini, mengingat salah satu variabel bebas (*gender*) merupakan variabel *dummy* yang dimana pemberian kategori (0) untuk laki-laki dan (1) untuk perempuan. Uji asumsi klasik dilakukan sebelumnya untuk

mengetahui apakah model regresi yang digunakan bebas dari masalah normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Tahap-tahap analisis data tersebut akan dilakukan setelah terlebih dahulu melakukan uji validitas dan uji reliabilitas pada instrumen-instrumen yang digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2012:52) dan untuk mengukur konsistensi jawaban responden pada kuesioner (Ghozali, 2012:47).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil uji validitas dan reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini. Tabel 2 menunjukkan nilai *pearson correlation* pada masing-masing instrumen $> 0,03$ yang berarti instrumen dinyatakan valid. Hasil uji reliabilitas ditunjukkan pada nilai *cronbach's alpha* pada masing-masing variabel $> 0,6$ yang berarti reliabel. Hasil dari uji instrumen tersebut dapat disimpulkan bahwa kuesioner layak digunakan untuk pengumpulan data.

Pengujian asumsi klasik dilakukan sebelum ketahap analisis regresi linear berganda dengan cara uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Uji Autokorelasi tidak digunakan karena data yang digunakan termasuk *cross section*. Berikut adalah hasil dari uji asumsi klasik yang ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 2.
Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji Validitas			Uji Reliabilitas		
Keterangan Variabel		Pearson Correlation	Kesimpulan	Cronbach's Alpha	Kesimpulan
Persepsi Kasus Korupsi (X ₁)	X _{1.1}	0,556	Valid	0,601	Reliabel
	X _{1.2}	0,545	Valid		
	X _{1.3}	0,552	Valid		
	X _{1.4}	0,570	Valid		
	X _{1.5}	0,508	Valid		
	X _{1.6}	0,454	Valid		
	X _{1.7}	0,55	Valid		
	X _{1.8}	0,558	Valid		
	X _{1.9}	0,519	Valid		
	X _{1.10}	0,696	Valid		
	X _{1.11}	0,454	Valid		
	X _{1.12}	0,666	Valid		
Norma Moral (X ₃)	X _{3.1}	0,625	Valid	0,850	Reliabel
	X _{3.2}	0,700	Valid		
	X _{3.3}	0,798	Valid		
	X _{3.4}	0,676	Valid		
	X _{3.5}	0,771	Valid		
	X _{3.6}	0,742	Valid		
	X _{3.7}	0,712	Valid		
	X _{3.8}	0,814	Valid		
Motivasi dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Y)	Y ₁	0,840	Valid	0,882	Reliabel
	Y ₂	0,632	Valid		
	Y ₃	0,604	Valid		
	Y ₄	0,603	Valid		
	Y ₅	0,822	Valid		
	Y ₆	0,723	Valid		
	Y ₇	0,68	Valid		
	Y ₈	0,494	Valid		
	Y ₉	0,866	Valid		
	Y ₁₀	0,395	Valid		

Sumber: Data diolah, 2014

Tabel 3.
Hasil Uji Asumsi Klasik

Variabel	Uji Normalitas	Uji Multikolinearitas		Uji Heteroskedastisitas
	Asymp. Sig. (2-tailed)	Tolerance	VIF	Signifikan
Persepsi Kasus Korupsi (X1)	0,951	0,968	1,033	0,887
Gender (X2)		0,886	1,129	0,443
Normal Moral (X3)		0,873	1,145	0,207

Sumber: Data diolah, 2014

Uji hipotesis dapat dilakukan setelah melakukan uji ketepatan model (Uji F). Tabel 4, memperlihatkan nilai sig. $F < 0,05$ yang berarti model layak uji dan pembuktian hipotesis dapat dilakukan.

Tabel 4.
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel Terikat	Variabel Bebas	Koefisien Regresi	Sig. t
Motivasi dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Y)	Persepsi Kasus Korupsi (X1)	-0,240	0,022
	Gender (X2)	1,976	0,006
	Norma Moral (X3)	0,687	0,000
Sig. F			0,000

Sumber: Data diolah, 2014

Pada kolom sig. t, variabel persepsi kasus korupsi memiliki nilai sig. sebesar $0,022 > 0,05$ (H_0 ditolak), yang menunjukkan bahwa persepsi kasus korupsi berpengaruh pada motivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Arah koefisien regresi adalah negatif (H_1 diterima), yang mencerminkan bahwa semakin kecil persepsi kasus korupsi maka akan memperbesar motivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sebaliknya, apabila semakin besar persepsi kasus korupsi maka akan memperkecil motivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan wajib pajak. Sejalan dengan hasil penelitian Irawan, dkk (2013) yang menyimpulkan bahwa penyelewengan pajak memengaruhi wajib pajak terhadap

motivasi secara negatif. Konsisten juga dengan penelitian yang dilakukan oleh, Benjamin (2013), Purnama Sari (2011), dan Auwaliah, dkk (2013).

Hasil perhitungan yang ditunjukkan Tabel 4 terkait *gender*, memiliki nilai sig. $0,006 < 0,025$ ($\alpha/2$) mengingat variabel ini menggunakan uji dua sisi (Ho ditolak) yang berarti *gender* berpengaruh pada motivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Tanda positif pada koefisien regresi tidak dapat dikatakan sebagai kenaikan atau memiliki hubungan yang searah. Hal ini dikarenakan *gender* tidak dapat ditentukan arahnya. Hasil penelitian ini mencerminkan bahwa keberadaan *gender* memainkan perannya pada seberapa besar motivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan wajib pajak (H_2 diterima). Hasil ini konsisten dengan penelitian dari Indonesia yakni Aryati (2012) yang membuktikan bahwa *gender* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil ini juga selaras dengan penelitian sebelumnya yakni McGee dan Smith (2007) yang menyimpulkan bahwa wanita lebih menentang tax evasion dari laki-laki, tetapi bukan berarti wanita lebih etis dari laki-laki. Sama halnya seperti hasil penelitian Hasseldine dan Peggy A. Hite (2003), Fallan (1999), Ruegger dan King (1992) sebelumnya.

Terakhir, terkait dengan variabel norma moral dimana memiliki nilai sig. $0,000 < 0,05$ (Ho ditolak), yang berarti norma moral berpengaruh pada motivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Arah koefisien regresi X_3 adalah positif (H_3 diterima), yang berarti semakin besar norma moral maka akan memperbesar motivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan wajib pajak. Sebaliknya, apabila semakin kecil norma moral maka akan memperkecil motivasi dalam memenuhi

kewajiban perpajakan wajib pajak. Penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya Basri, dkk (2012), Benk, *et al.* (2011), dan Kaplan *et al.* (1997). Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan yang dilakukan Handayani (2009) yang membuktikan bahwa kewajiban moral secara parsial berpengaruh pada kepatuhan pelaporan WPOP.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah persepsi kasus korupsi berpengaruh negatif pada motivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan WPOP nonkaryawan di KPP Pratama Badung Selatan. Variabel *gender* berpengaruh pada motivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan WPOP nonkaryawan di KPP Pratama Badung Selatan. Variabel norma moral berpengaruh positif pada motivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan WPOP nonkaryawan di KPP Pratama Badung Selatan.

Saran yang dapat diberikan adalah pihak lembaga perpajakan dan pemerintah agar lebih melakukan pembenahan dari segi peraturan maupun pengawasan serta aktif dalam menekan tindakan korupsi. Tujuannya guna mengembalikan kepercayaan dan keyakinan masyarakat akan peran pemerintah Indonesia maupun para pegawai di lembaga perpajakan. KPP Pratama Badung Selatan diharapkan untuk lebih memahami dan lebih intensif memberikan perhatian ataupun pembinaan terhadap wajib pajak dalam segi *gender*. Pembinaan dan pemberian pengetahuan sejak dini terhadap wajib pajak harus terus dilakukan. Hal ini untuk meningkatkan kesadaran dalam diri wajib pajak dan lebih

menumbuhkembangkan rasa kebersamaan dan membentuk moral yang tinggi terkait betapa pentingnya pajak itu sendiri. Saran juga diberikan pada wajib pajak agar untuk selalu berfikiran positif akan tujuan dan manfaat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan sadar akan pentingnya membayar pajak. Wajib pajak juga harus tetap percaya pada lembaga hukum dalam menangani dan memberikan hukuman kepada oknum-oknum yang melakukan penyelewengan pajak.

REFERENSI

- Asshiddiqie, Prof. Dr. Jimly, SH dan M. Ali Safa'at, S.H., M.H. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Aryati, Titik. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Media Ekonomi dan Manajemen*. Vol. 25 (1).
- Auwaliah, M., Prasetyono, dan Gita Arasy Harwida. 2013. Persepsi Wajib Pajak Badan atas Kasus Mafia Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada Wajib Pajak Badan Di Kota Sidoarjo). *Jurnal Fakultas Ekonomi*. Universitas Trunojoyo Madura.
- Basri, Y. M., Raja Adri S. S., Resy F., Rahmat N., dan Tengku Septiani T. 2012. Studi Kepatuhan Pajak: Faktor yang Mempengaruhinya (Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru). *Makalah Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*.
- Benjamin, Aga Vanesha. 2013. Pengaruh Persepsi, Kualitas Layanan, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Motivasi Membayar Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Hi-Tech Mall, Surabaya. *Skripsi S1 Universitas Katolik Dharma Cendika*.
- Benk, S., Ahmet F. Cakmak, and Tamer Budak. 2011. An Investigation of Tax Compliance Intention: a Theory of Planned Behavior Approach. *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences*. Vol. 28.
- Carroll, J. 1987. Compliance with The Law: a Decision-making Approach to Taxpaying. *Law and Human Behavior*. Vol. 11: Hal. 319-335.

- Coet, L. J., dan McDermott, P. J. 1979. Sex, Instructional Set, and Group Make-Up: Organismic and Situational Factors Influencing Risk-Taking. *Psychological Reports*. Vol. 44: Hal. 1283-1294.
- Fallan, Lars. 1999. Gender, Exposure to Tax Knowledge, and Attitudes Towards Taxation: an Experimental Approach. *Journal of Business Ethich*. Vol. 18 (02): Hal. 173
- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gibson, James L., John. M. Ivancevich, dan James H. Donnelly, Jr (Ir. Nunuk Adiarni MM, Penerjemah). 1996. *Organisasi*. Edisi kedelapan. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Gosh, D. and T. Crain. 1996. Experimental Investigation of Ethical Standards and Perceived Probability of Audit on Intentional Noncompliance. *Behavioral Research in Accounting*. Vol. 8: Hal. 57-75
- Gustina. 2008. Etika Bisnis Suatu Kajian Nilai dan Moral dalam Bisnis. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 3 (02): Hal. 137-146.
- Handayani. 2009. Pengaruh Tanggung Jawab Moral dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat. *Buletin Studi Ekonomi*. Vol. 16 (1): Hal. 26-33. Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Hanno, D., dan G. Violette. 1996. An Analysis of Moral and Social Influences on Taxpayer Behavior. *Behavioral Research in Accounting*. Vol. 8: Hal. 57-75.
- Hasseldine, John and Peggy A. Hite. 2003. Farming, Gender and Tax Compliance. *Journal of Economic Psychology*. Vol. 24: Hal. 517-533.
- Ho, Daniel. 2009. A Study of Hongkong Tax Compliance Ethics. *International Business Research*. Vol. 2(4).
- Irawan, C., dan Azwir Nasir R. 2013. Pengaruh Pengetahuan Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Penyelewengan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Mengenai Kinerja Pelayanan Pajak terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Riau
- James, S., J. Hasseldine, P. Hite and M. Toumi. 2001. Developing a Tax Compliance Strategy for Revenue Service. *Bulletin for International Fiscal Documentation*. Vol. 55: Hal. 158-164.

- Kaplan, Steve E., Kaye J. Newberry, and Philip M. J. Reckers. 1997. The Effect of Moral Reasoning and Educational Communications on Tax Evasion Intentions. *The Journal of the American Taxation Association*. Vol. 19 (2): Hal. 38-54.
- Kasipillai, J., and H. A. Jabbar. 2006. Gender and Ethnicity Differences in Tax Compliance. *Asian Academy of Management Journal*. Vol 11 (2): Hal. 73-88.
- Lubis, Arfan Ikhsan. 2011. *Akuntansi Keperilakuan*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- McGee, Robbet W. dan Sheldon R. Smith. 2007. Ethics, Tax Evasion, Gender and Age: an Empirical Study of Utah Opinion. *Andreas School of Businee Working Paper*, Barry University, Miami Shores, FL 33161 USA.
- Murniati, A. Nunuk P. 2004. *Getar Gender (Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum, dan HAM)*. Buku Pertama. Magelang: Yayasan Adikarya IKAPI.
- Permadi, T., H. Azwir Nasir, dan Yuneita Anisma. 2013. Studi Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Kasus Pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru). *Jurnal Ekonomi*. Vol. 21 (2).
- Prijatna, Hendra. 2012. *Study Gender (Modul untuk Lingkungan Sendiri)*. Universitas Bale Bandung (UNIBBA).
- Purnama Sari, Dian. 2011. Persepsi Wajib Pajak terhadap Dunia Perpajakan Indonesia Setelah Fenomena Kasus “Gayus Tambunan” dengan Pendekatan Triangulasi. *SNA XIC Aceh*. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
- Robbins, Stephen P., dan Timothy A. Judge. 2009. *Perilaku Organisasi Organizational Behavior*. Edisi ke 12. Terjemahan oleh Diana Angelica, Ria Cahyani, dan Abdul Rosyid. Jakarta: Salemba Empat.
- Rubin, P. H., dan Paul, C. W. 1979. An Evolutionary Model of Tastes for Risk. *Economic Inquiry*. Vol. 17: Hal. 585-596.
- Ruegger, D. dan E.W.King. 1992. An Study of Effect of Age and Gender Upon Student Business Ethics. *Journal of Business Ethics*. Vol 11: Hal. 179-186.
- Supriyati. 2012. Dampak Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal InFestasi*. Vol. 8 (01): Hal. 15-32.

Torgler, B., Ihsan C. Demir, Alison Macintyre and Marcus Schaffner. 2008.
Couse and Consequences of Tax Morale: an Empirical Investigation.
Aconomic Analysis and Polocy. Vol. 38 (2).